
PERANAN PENDAPATAN RETRIBUSI OBYEK PARIWISATA BATURADEN TERHADAP PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Oleh : Sukardi

Latar Belakang

Dengan memperhatikan perubahan struktur ekonomi di banyak negara, arah perekonomian nasional tampaknya juga akan menuju pada perekonomian yang mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan struktur ekonomi tampak terjadi dengan terus meningkatnya peran sektor industri terhadap PDB yaitu dari 9,3% pada tahun 1984 menjadi 23,9% pada tahun 1994, serta menurunnya sektor pertanian dari 22,7% pada tahun 1984 menjadi 17,5% pada tahun 1994. Proses transformasi ekonomi yang didorong oleh kebijakan pemerintah selama pembangunan jangka panjang tahap kedua yang mengarahkan struktur ekonomi menuju industrialisasi telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia Pasifik (Ditjen Pariwisata, 1996 : 1 - 4). Peran minyak dan gas bumi sebagai komoditi ekspor dan sumber pendapatan negara relatif menurun, dari US\$ 14 juta pada tahun 1984/85 menjadi US\$ 9,7 juta pada tahun 1993/94. Sementara itu impor migas dan jasa oleh sektor migas telah mengalami peningkatan sehingga penerimaan bersih dari sektor migas menurun dari US\$ 7,8 milyar menjadi US\$ 5,5 milyar. Jika peningkatan nilai impor migas mencapai 5% per tahun, dan nilai ekspor non migas

mengalami stagnasi, maka dalam sepuluh tahun mendatang ekspor migas diperkirakan tidak akan memberikan sumbangan bersih pada penerimaan devisa (Ditjen Pariwisata, 1996 : 7).

Berakhirnya Pelita V sebagai babak akhir PJP I mungkin disadari bahwa peranan migas tidak bisa diandalkan lagi untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini makin memperkuat keyakinan akan pentingnya peranan sektor pariwisata nasional pada periode berikutnya. Setelah tekstil, sektor pariwisata Indonesia berpeluang besar sebagai penyumbang devisa, dimana Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tidak ada duanya di belahan dunia manapun.

Republik Indonesia dibidang pariwisata juga tidak perlu diragukan lagi. Ini terbukti dengan berbagai pengakuan Internasional yang diterima Indonesia sebagai daerah tujuan wisata terbaik, dan kawasan wisata terbaik yang diberikan majalah pariwisata dunia. Pengakuan Internasional juga terlihat dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara sidang umum organisasi pariwisata dunia (WTO) di Nusa Dua Bali pada Oktober 1993.

Dalam GBHN 1999 disebut bahwa pembangunan pariwisata diarahkan dengan mengembangkan, mendayagunakan sumber dan potensi Kepariwisata Nasional menjadi

kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memper besar penerimaan devisa, memper luas dan pemeratakan kesempatan berusaha serta lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat., mendorong pembangunan daerah serta mem perkenalkan alam, nilai dan budaya bangsa. Pembangunan pariwisata bertujuan menyiapkan daerah tujuan wisata, sehingga dapat meningkatkan arus wisatawan. Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, terutama menyangkut peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Adapun alasan pemilihan judul, karena obyek wisata Baturaden merupakan salah satu obyek yang paling besar diantara obyek-obyek yang ada di Kabupaten Banyumas, maka tertarik untuk diadakan penelitian guna mengukur tingkat kontribusi pendapatan obyek pariwisata Baturaden terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas. Dengan makin penting nya sektor pariwisata dalam menyumbang pendapatan bagi daerah, maka timbul permasalahan dengan berkembangnya obyek wisata Baturaden apakah berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan obyek wisata tersebut.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Secara spesifik tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :

1. Untuk menghitung besarnya kontribusi pendapatan retribusi obyek pariwisata

Baturaden terhadap retribusi daerah.

2. Untuk mengukur tingkat efisiensi operasional obyek pariwisata Baturaden.
3. Untuk mengukur tingkat efektivitas usaha obyek pariwisata Baturaden.
4. Untuk memproyeksikan penerimaan retribusi obyek pariwisata Baturaden 5 tahun kedepan.

b. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dan menjadikan bahan dalam rumusan kebijakan dimasa datang pengelolaan sumber-sumber pendapatan retribusi obyek pariwisata yang mendukung pendapatan retribusi daerah. Pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menunjang kelancaran pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Tinjauan Pustaka

a. Pariwisata dan Pendapatan Daerah

Sumber daya alam berupa hutan dengan segala isinya, daratan dengan segala bentuk nya serta lautan dengan segala potensinya telah dimanfaatkan dan terus dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, maka menurut Fandeli (1995:35), perlu dicari upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber alam tersebut, salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah adalah dengan kegiatan pariwisata

wisata. Kegiatan pariwisata yang dilaksanakan khususnya pariwisata alam harus ditunjang oleh banyak sektor, antara lain sektor perhubungan, kehutanan, industri dan pekerjaan umum. Menikmati pemandangan alam yang indah seperti gunung, air terjun, hutan, ikan hias pada habitat terumbu karang merupakan kegiatan wisata yang dapat dinikmati setempat.

Pada umumnya dari obyek wisata alam yang jauh lokasinya ini hanya dapat dinikmati dengan cara yang agak sulit dan usaha yang banyak memakan waktu dan tenaga seperti penelusuran gua, arung arus deras, petualangan alam hutan dan menyelam hanya dapat dilakukan oleh orang dalam kelompok umur remaja. Sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka pendapatan daerah terdiri antara lain pajak daerah dan retribusi daerah, sedang retribusi daerah salah satu sumbernya adalah pendapatan obyek pariwisata. Dengan demikian pendapatan obyek pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

b. Pemasaran Wisata Alam

Pemasaran menurut Kotler dan Susanto (2001:16) merupakan proses analisis, perencanaan, implementasi dan pengendalian dari suatu program yang dirumuskan untuk mengadakan pertukaran nilai secara sengaja sesuai dengan sasaran tertentu demi tercapainya tujuan organisasi, bila dikaitkan dengan konteks industri pariwisata, pe-

masaran pariwisata biasanya dimengerti sebagai usaha untuk mendekatkan terjadinya pertemuan antara sisi penawaran dan permintaan. Dalam hal ini, produksi yang diperjual belikan adalah pengalaman, dan ke seluruh proses tadi bermuara pada pencapaian tujuan untuk meningkatkan frekuensi terjadinya transaksi pariwisata bagi suatu negara (Fandeli, 1995:26-27).

c. Pembangunan Pariwisata

Bagi Indonesia sesuai dengan GBHN tujuan pembangunan sub sektor pariwisata meliputi berbagai makna seperti makna politik, ekonomi, sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Dilihat dari segi ekonomi pembangunan kepariwisataan di harapkan mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan daerah, pendapatan negara dan devisa dapat ditingkatkan melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional (GBHN, 1988).

Soekadijo (1996:46-69), juga menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dibutuhkan modal yaitu modal yang dimiliki oleh kawasan obyek wisata itu sendiri, atau sering juga disebut sebagai sumber daya kepariwisataan. Modal tersebut merupakan suatu kondisi yang memiliki bentuk khas dan mempunyai daya tarik tersendiri yang dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata, selanjutnya ditambahkan bahwa potensi modal kepariwisataan terdiri dari tiga, yaitu alam, manusia dan budaya.

d. Pendekatan Penyediaan Dasar Tarif

Davey (1988:144-147), mengemukakan tentang penentuan tingkat retribusi (harga dari jasa yang disediakan pemerintah) yang didasarkan atas biaya operasional, dalam hal ini retribusi dapat ditentukan di bawah biaya operasional dan dapat juga retribusi ditentukan di atas biaya operasional. Apabila retribusi ditentukan di bawah biaya operasional, maka konsekuensinya adalah perlu adanya subsidi dari pemerintah yang berasal dari pajak. Hal ini dipandang perlu atau dibenarkan karena beberapa alasan :

1. sifat layanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara kolektif, tapi Pemerintah memandang perlu adanya pendisiplinan masyarakat dalam mengonsumsi layanan tersebut;
2. sifat layanan yang merupakan gabungan antara barang swasta dan barang kolektif sehingga dipandang untuk merangsang tabungan masyarakat atau kemanfaatan umum;
3. sifat layanan yang merupakan barang kolektif tetapi permintaannya merupakan permintaan yang populer sehingga perlu memberikan subsidi atas layanan tersebut;
4. sifat layanan yang merupakan barang kebutuhan pokok manusia dan khususnya bagi mereka yang berpendapatan rendah.

Untuk menutup pengeluaran biaya atas penyediaan layanan suatu jasa oleh Pemerintah, retribusi dapat juga ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut.

1. Retribusi dikenakan karena bersifat mengatur dan melibatkan sedikit biaya langsung, misalnya retribusi atas ijin.
2. Retribusi dikenakan karena bersifat menertibkan konsumsi masyarakat atas suatu barang.

Secara retorik pungutan retribusi yang dibebankan kepada seseorang wajib retribusi haruslah berdasarkan pada pengertian efisiensi ekonomis, artinya bahwa retribusi yang dibayar oleh wajib retribusi mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari pada pungutan retribusi. Pungutan retribusi hanya dapat dikenakan terhadap wajib retribusi yang menikmati barang dan layanan tersebut artinya hampir tertutup kemungkinan terjadinya eksternalitas (kerugian seseorang yang disebabkan oleh usaha orang lain) dan adanya *free riders* (orang yang berusaha dalam suatu lokasi tanpa dipungut retribusi) terhadap barang dan layanan pemerintah daerah tersebut. Harga layanan yang harus dibayar oleh wajib retribusi memainkan peran penting dalam menentukan besarnya permintaan, mengurangi terjadinya pemborosan dan menjadi salah satu pedoman bagi penyediaan layanan mengenai besarnya produksi layanan yang harus dikenakan. Proses selanjutnya penyediaan layanan menggunakan penerimaan dari hasil pungutan retribusi tersebut untuk menentukan produksi sesuai dengan keadaan permintaan.

Dalam situasi demikian harga barang dan layanan yang diberikan harus selalu disesuaikan, penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang bersangkutan. Kesulitan yang muncul dalam penetapan harga barang dan layanan dalam bentuk retribusi disebabkan sebagian besar layanan diberikan pemerintah atau pemerintah daerah secara monopoli, bukan dalam kondisi dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar yang di dalamnya terjadi persaingan sempurna harga barang dan layanan akan memberikan manfaat ekonomi yang maksimum kepada masyarakat.

Di dalam pasar yang monopoli pemerintah, maka pemerintah pusat atau daerah dalam menetapkan harga barang dan layanan tersebut harus bersikap seolah-olah dalam pasar terjadi persaingan bebas. Dengan demikian harga barang dan layanan tersebut bukan merupakan keputusan tanpa perhitungan, melainkan sesuai hukum permintaan dan penawaran (Devas dkk, 1989:95).

e. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui pengertian PAD atau retribusi daerah belum ada buku-buku atau jurnal yang mendefinisikan secara jelas, akan tetapi komponen-komponen dari PAD ada disebutkan dalam Undang-Undang no. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Deppen

RI 1992). Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

1. hasil pajak daerah yang meliputi pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan C, pajak air bawah tanah dan air permukaan, tunggakan pajak dan denda pajak;
2. hasil retribusi daerah yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, biaya cetak KTP dan Akte, biaya parkir, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, terminal, pesanggrahan, penyedot kakus, rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olahraga, penjualan produksi usaha daerah, ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan, ijin trayek;
3. hasil perusahaan daerah meliputi bank pembangunan daerah, perusahaan air minum, BPR/BKK;
4. lain-lain usaha daerah yang syah meliputi hasil penjualan milik daerah, jasa giro, ganti rugi atas kekayaan daerah.

Dalam praktek pemerintahan di daerah tentang PAD terdiri dari pajak-pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas dan pendapatan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan murni dari daerah.

f. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang

diberikan oleh daerah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah, pemungutan retribusi jelasnya bahwa retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang dapat diberikan.

Retribusi daerah bukanlah pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha yang dapat dianggap sebagai perusahaan. Pemungutan retribusi daerah harus ditetapkan sesuai dengan pemakaian atas pekerjaan usaha milik daerah atau jasa yang diberikan oleh daerah.

Retribusi seperti halnya pajak langsung dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan (Nota Keuangan RI, 1966). Adapun sumber pendapatan dari retribusi daerah menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 meliputi berikut ini.

1. Pelayanan kesehatan
2. Pelayanan persampahan
3. Penggantian biaya cetak KTP dan Akte
4. Parkir di jalan umum
5. Pasar
6. Pengujian kendaraan bermotor
7. Pemakaian kekayaan daerah
8. Terminal
9. Pesanggrahan / Villa
10. Penyedot kakus
11. Rumah potong jewan

12. Tempat rekreasi dan olah raga
13. Penjualan produksi usaha tanah
14. Ijin mendirikan bangunan
15. Ijin trayek

Metodologi Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan pada obyek pariwisata Baturaden Kabupaten Banyumas yang letaknya \pm 14 km ke arah utara kota Purwokerto. Obyek pariwisata Baturaden memiliki luas wilayah \pm 5,5 ha dengan tingkat ketinggian 250 m dari permukaan air laut dan perbatasan dengan :

Sebelah Utara Perhutani Wilayah Banyumas

Sebelah Barat Kecamatan Kedung Banteng

Sebelah Selatan Kecamatan Purwokerto

Sebelah Timur Kecamatan Sumbang

b. Data yang dibutuhkan

1. Data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber penelitian yaitu data yang diperoleh dari Kantor Pariwisata Baturaden.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber lain yang sifatnya mendukung dalam proses penelitian, misalnya data dari Dinas Pendapatan Daerah seperti PAD, data dari Kantor Statistik Kabupaten Banyumas seperti PDBR sub sektor Pariwisata.

c. Cara pengumpulan data

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam proses penelitian baik data utama maupun pendukung maka diperlukan cara pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut.

1. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan peninjauan /

pengamatan secara langsung ke tempat yang diteliti.

2. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan petugas yang berwenang untuk memberikan data.

Analisis Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata Baturaden

a. Peranan pendapatan retribusi obyek pariwisata terhadap retribusi daerah

Untuk dapat mengetahui besarnya peranan pendapatan retribusi obyek pariwisata Baturaden terhadap retribusi daerah selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 1995 – 1996 sampai dengan tahun 1999 – 2000 digunakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menentukan tingkat pertumbuhan realisasi pendapatan retribusi obyek Pariwisata Baturaden.
2. Menentukan tingkat pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Banyumas.

❖ Menentukan tingkat pertumbuhan realisasi pendapatan retribusi obyek Pariwisata Baturaden.

Dari data penerimaan pendapatan retribusi selama lima tahun terakhir, dari 1995-1996 s/d 1999-2000 terdapat adanya perubahan pertumbuhan yang masing-masing adalah 8,49%, (6,58%), 49,53%, 36,19% dan bila di cermati lebih mendalam terdapat adanya perubahan penerimaan pendapatan retribusi yang cukup besar yaitu dari tahun anggaran 1998-1999 mencapai jumlah Rp 677.829.800,- menjadi Rp 923.190.050,- pada tahun anggaran 1999-2000, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 36,19%, kejadian ini disebabkan karena adanya lonjakan jumlah pengunjung dari 294.597 orang pada tahun anggaran 1998/1999 menjadi 400.181 orang pada tahun anggaran 1999/2000 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi,
1995-1996 s/d 1999-2000

No	Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Pariwisata (Rp)	Pertumbuhan		
			(Rp)	ΔX_1 (%)	R (%)
1.	1995-1996	447.252.450			
2.	1996-1997	485.230.500	37.978.050	8,49	
3.	1997-1998	453.288.000	(31.942.500)	(6,58)	21,90
4.	1998-1999	677.829.800	224.541.800	49,53	
5.	1999-2000	923.190.050	245.360.250	36,19	
Jumlah				87,63	

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas, Statistik Kepariwisata Tahun 1995/1996 s/d 1999/2000.

❖ **Menentukan tingkat perumbuhan retribusi daerah Kabupaten Banyumas.**

Dari data penerimaan retribusi daerah salam lima tahun terakhir dari tahun anggaran 1995-1996 s/d 1999-2000 selalu menunjukan adanya perubahan, yang diawali dengan adanya pe nurunan dan diakhiri dengan kenaikan penerimaan retribusi daerah, hal ini dapat dilihat pada tahun anggaran 1995-1996 mencapai jumlah Rp 5.712.553.939 dan pada tahun anggaran 1999-2000 menjadi Rp 10.933.188.044. Adapun laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah dari tahun anggaran 1995-1996 s/d 1999-2000 masing-masing mencapai sebesar

(21,54%), 5,83%, (18,89%) dan 184,17% dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun anggaran mencapai 37,39%. Bila dicermati lebih mendalam terdapat perubahan pendapatan retribusi daerah, yang menyolok dari tahun anggaran 1998-1999 ke tahun anggaran 1999-2000 yang besarnya mencapai 184,17% keadaan ini di sebabkan karena semua penerimaan dari sumber-sumber yang terdapat pada retribusi daerah mengalami kenaikan terutama dari sumber Puskesmas, walau pun dilihat dari sisi jumlah sumber penerimaan retribusi daerah mengalami pengurangan (UU 18 1997), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Kabupaten Banyumas, 1995-1996 s/d 1999-2000

No	Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Pariwisata (Rp)	Pertumbuhan		
			(Rp)	ΔX_1 (%)	R (%)
1.	1995-1996	5.712.553.939			
2.	1996-1997	4.482.308.934	(1.230.245.005)	(21,54)	
3.	1997-1998	4.734.740.467	261.431.533	5,83	
4.	1998-1999	3.847.376.211	(896.346.256)	(19,89)	37,39
5.	1999-2000	10.933.118.044	7.085.741.829	184,17	
Jumlah				149,57	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, Laporan Pendapatan Tahun Anggaran 1995-1996 s/d 1999-2000.

Untuk dapat mengetahui besarnya peranan retribusi pendapatan obyek pariwisata Baturaden terhadap retribusi daerah selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 1995-1996 s/d 1999-2000 adalah

berturut-turut sebagai berikut 7,83%, 10,83%, 9,56%, 17,61%, 8,44%, dengan tingkat kontribusi rata-rata 10,85%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel
Sumbangan Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata Baturaden Terhadap Retribusi Daerah

No	Tahun Anggaran	Pendapatan Retribusi Pariwisata (Rp)	Pendapatan Retribusi Daerah (Rp)	Sumbangan (%)
1.	1995-1996	447.252.450	5.712.553.939	7,83
2.	1996-1997	485.230.500	4.482.308.934	10,83
3.	1997-1998	453.288.000	4.734.740.467	9,56
4.	1998-1999	677.829.800	3.847.376.211	17,61
5.	1999-2000	923.190.050	10.933.118.044	8,44
			Rata-rata	10,85

b. Pengukuran tingkat efisiensi

Untuk dapat mengetahui tingkat efisiensi usaha obyek pariwisata Baturaden dapat dilakukan dengan jalan membandingkan antara biaya operasional rutin yang dikeluarkan dengan pendapatan retribusi obyek pariwisata yang diperoleh selama lima tahun terakhir, pada tahun 1995-1996 s/d 1999-2000. Data yang diperoleh tentang biaya operasional rutin obyek pariwisata Baturaden selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tahun 1995-1996 mencapai Rp 340.824.274 pada tahun anggaran 1999-2000 menjadi sebesar Rp 411.937.253. Adapun

laju perkembangan biaya operasional dari tahun anggaran 1995-1996 s/d 1999-2000 masing-masing sebesar 4,62%, 0,02%, 7,75%, 7,39% dengan rata-rata laju pertumbuhan biaya operasional selama lima tahun mencapai sebesar 4,90%. Bila dicermati lebih mendalam terdapat pertumbuhan yang me nyolok dari biaya operasional rutin pada tahun 1998-1999 ke tahun 1999-2000 yaitu mencapai tingkat 7,39%, hal ini disebabkan adanya kenaikan biaya operasional dari unsur pemeliharaan, PBB, upah pungut dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Laju Pertumbuhan Biaya Operasional
Obyek Pariwisata Baturaden

No	Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Pariwisata (Rp)	Pertumbuhan		
			(Rp)	ΔX_1 (%)	R (%)
1.	1995-1996	340.824.274			
2.	1996-1997	356.579.580	15.755.306	4,62	4,90
3.	1997-1998	356.662.455	8.875	0,02	
4.	1998-1999	383.589.443	26.926.988	7,55	
5.	1999-2000	411.937.253	28.347.810	7,39	
Jumlah				19,58	

Untuk dapat mengetahui tingkat efisiensi usaha obyek pariwisata Baturaden selama lima tahun mulai tahun 1995-1996 s/d 1999-2000 dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang hasilnya berturut-turut sebagai berikut 0,76, 0,73, 0,79, 0,80, 0,44, dengan rata-rata efisiensi sebesar 0,70 selama lima tahun. Menurut rumus efisiensi Sidik

(1994), hasil efisiensi mendekati 0,00 adalah tinggi, sedang hasil efisiensi mendekati 1,00 adalah rendah, sedang hasil perhitungan efisiensi diatas adalah 0,70, karena ini tidak mendekati 0,00, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan obyek pariwisata Baturaden mempunyai tingkat efisiensi yang rendah dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Tingkat Efisiensi Usaha Obyek Pariwisata Baturaden
1995-1996 s/d 1999-2000

No	Tahun Anggaran	Biaya Operasional (Rp)	Pendapatan (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	1995-1996	340.824.274	447.252.450	0,76
2.	1996-1997	356.579.580	485.230.500	0,73
3.	1997-1998	356.662.455	453.288.000	0,79
4.	1998-1999	383.589.443	677.829.800	0,80
5.	1999-2000	411.937.253	923.190.050	0,44
			Rata-rata	0,70

c. Pengukuran tingkat efektivitas

Untuk dapat mengetahui tingkat efektivitas usaha obyek pariwisata Baturaden, maka perlu membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan retribusi selama kurun

waktu lima tahun dari tahun anggaran 1995-1996 s/d 1999-2000. dari data yang diperoleh dapat disusun target pendapatan retribusi obyek pariwisata Baturaden selama lima tahun terakhir, pada tahun 1995-1996 sebesar Rp 500.000.000

dan pada tahun anggaran 1999-2000 menjadi sebesar Rp 865.000.000. Laju pertumbuhan pendapatan target retribusi selama lima tahun terakhir dari tahun 1995-1996 s/s 1999-2000 masing-masing sebesar 5%,

7,62%, 9,38%, 39,97% dengan tingkat perkembangan rata-rata sebesar 15,49%. Untuk dapat lebih jelasnya tentang perkembangan target penerimaan retribusi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Laju Pertumbuhan Target Penerimaan Retribusi
Obyek Pariwisata Baturaden Selama lima Tahun Anggaran

No	Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Pariwisata (Rp)	Pertumbuhan		
			(Rp)	ΔX_1 (%)	R (%)
1.	1995-1996	500.000.000			
2.	1996-1997	525.000.000	25.000.000	5	15,49
3.	1997-1998	565.000.000	40.000.000	7,62	
4.	1998-1999	618.000.000	53.000.000	9,38	
5.	1999-2000	865.000.000	247.000.000	39,97	
Jumlah				61,97	

Untuk dapat mengetahui tingkat efektivitas obyek pariwisata Baturaden selama lima tahun berturut-turut adalah dengan membandingkan antara realisasi pendapatan retribusi obyek pariwisata dengan target pendapatan retribusi yang hasilnya masing-masing sebagai berikut 89,45%, 92,44%, 80,23%, 109,23%,

106,73% dengan tingkat efektivitas rata-rata 95,71%. Sesuai dengan kriteria Fauzi (1997), bahwa tingkat efektivitas rata-rata 95,7% adalah sudah efektif, karena termasuk diantara 80% - 100%. Untuk dapat lebih jelas tingkat efektivitas obyek wisata Baturaden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Tingkat Efektivitas Usaha Obyek Pariwisata Baturaden,
Tahun 1995-1996 s/d 1999-2000

No	Tahun Anggaran	Biaya Operasional (Rp)	Pendapatan (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	1995-1996	447.252.450	500.000.000	89,45
2.	1996-1997	485.230.500	525.000.000	92,44
3.	1997-1998	453.288.000	565.000.000	80,23
4.	1998-1999	677.829.800	618.000.000	109,23
5.	1999-2000	923.190.050	865.000.000	106,73
			Rata-rata	95,71

d. Proyeksi penerimaan retribusi obyek pariwisata Baturaden

Untuk dapat mengetahui proyeksi penerimaan retribusi

obyek pariwisata Baturaden lima tahun ke depan digunakan langkah-langkah sebagai berikut sesuai dengan model (5).

Tabel
Analisis Trend Linier

No	Tahun Anggaran	Pendpt. Retribusi (dlm puluhan jutaRp)	t	Yt	t ²	Ŷ
1.	1995-1996	4,47252450	1	4,4725	1	3,8846
2.	1996-1997	4,85230500	2	9,7046	4	4,7291
3.	1997-1998	4,53288000	3	13,5986	6	5,5736
4.	1998-1999	6,77829800	4	19,1131	16	6,4181
5.	1999-2000	9,23190050	5	46,1595	25	7,2626
		27,687908	15	93,0483	55	

$$Y = a + b(t)$$

$$b = \frac{n \cdot \sum Yt - \sum Y \cdot \sum t}{n \cdot \sum (t^2) - (\sum t)^2}$$

$$= \frac{5 \cdot (93,0483) - (27,767908) \cdot (15)}{5 \cdot (55) - (15)^2}$$

$$= \frac{460,2415 - 418,0186}{275 - 225}$$

$$= \frac{42,2229}{50} = 0,8445$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} - b \frac{\sum t}{n}$$

$$= \frac{27,867908}{5} - 0,8445 \frac{15}{5}$$

$$= 5,5736 - 2,5335$$

$$= 3,0401$$

$$\text{Jadi } \hat{Y} = 3,0401 + 0,8445(t)$$

Keterangan.

a = 3,0401 adalah besarnya ramalan pendapatan retribusi obyek pariwisata

Baturaden pda tahun 1995-1996 yang kenyataannya adalah 4,4725.

b = 0,8445 adalah besarnya angka kenaikan jumlah pendapatan retribusi

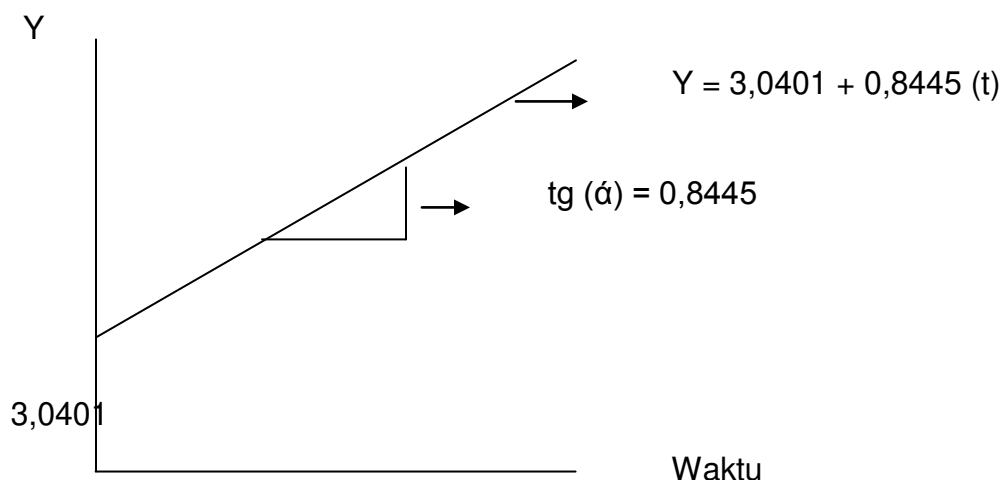
pariwisata Baturaden per tahun anggaran selama periode penelitian, atau rata-rata per tahun naik sebesar Rp 84.450.000,-

Jadi jika diramal penerimaan pendapatan retribusi obyek pariwisata Baturaden untuk masa lima tahun kedepan menjadi.

$$\hat{Y} = 3,0401 + 0,8445(10)$$

$$= 3,0401 + 8,445 = 11,4851$$

Jadi penerimaan retribusi obyek pariwisata Baturaden untuk jangka waktu lima tahun ke depan diramalkan menjadi Rp 1.148.510.000,-



Gambar
Diagram Analisis Trend Linier Pendapatan Retribusi
Obyek Pariwisata Baturaden

Kesimpulan Dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam deskripsi hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sumbangan pendapatan retribusi obyek pariwisata Baturaden terhadap pendapatan retribusi daerah dari tahun pertama hingga tahun kelima mengalami perubahan yaitu masing-masing 7,83%, 10,83%, 9,56% dan 17,61% dan pada tahun kelima menjadi 8,44% dengan tingkat sumbangan rata-rata selama lima tahun 9,82%. Hal ini disebabkan karena secara total pendapatan retribusi obyek pariwisata hanya mencapai 0,09 bagian dari total pendapatan retribusi daerah.
2. Tingkat efisiensi operasional obyek pariwisata Baturaden selama lima tahun berturut-turut masing-masing mencapai 0,76, 0,73, 0,79, 0,80, 0,44 dengan tingkat efisiensi rata-rata

0,70. Secara ekonomis tingkat efisiensi rata-rata 0,70 adalah tidak efisien karena sesuai dengan kriteria Sidik (1994; 65-76), bahwa hasil 0,70 adalah tidak mendekati 0,00. Kondisi ini disebabkan secara total operasional obyek pariwisata mencapai 0,61 bagian dari total pendapatan retribusi obyek pariwisata Baturaden.

3. Tingkat efektivitas usaha obyek pariwisata Baturaden dari tahun pertama hingga tahun kelima selalu mengalami kenaikan yaitu masing-masing 89,45%, 92,44%, 80,23%, 109,68% dan terakhir 106,71%, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 95,71%. Secara ekonomis tingkat efektivitas rata-rata 95,71% adalah sudah efektif, karena menurut kriteria Fauzi (1997:70), suatu usaha dikatakan efektif bila

menghasilkan tingkat efektivitas antara 80% – 100%. Kondisi ini disebabkan oleh per tumbuhan pendapatan retri busi obyek pariwisata lebih besar dibanding pertumbuhan target pendapatan retribusi (21,90% > 15,49).

4. Proyeksi pendapatan retribusi obyek pariwisata Baturaden pada tahun mendatang di gunakan persamaan trend linier $\hat{Y} = 3,04 + 0,84 t$.

b. Saran-saran

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka saran-saran yang perlu dikemukakan dalam rangka meningkatkan pendapatan retri busi obyek pariwisata Baturaden terhadap pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

Melihat besarnya sumbangan pendapatan retribusi obyek pariwisata Baturaden terhadap retribusi daerah sebesar 9,82%, ditingkatkan lagi sumbangannya dengan jalan promosi secara lebih intensif ke instansi-instansi terkait, serta menambah volume panggung-panggung hiburan

pada hari-hari libur nasional dan perlu kerja sama dengan biro-biro perjalanan /wisata agar jumlah pe ngunjung lebih meningkat.

1. Tingkat efisiensi obyek pariwisata Baturaden yang mencapai rata-rata 0,70 perlu ditingkatkan lagi agar men capai kriteria efisien dengan jalan menekan pengeluaran biaya operasional disatu pihak seperti biaya pungut retribusi diperkecil dan tidak perlu adanya penambahan peawai dan bila perlu dikurangi baik yang tetap maupun honorer dan dilain pihak perlu me ningkatkan pendapatan retr ibusi dengan jalan meningkat kan promosi panggung-panggung hiburan dan kerja sama dengan biro-biro per jalanan.
2. Perlu menarik investor untuk penambahan fungsi dari obyek pariwisata, dari fungsi rekreasi ditambah menjadi fungsi olah raga, fungsi pertanian, fungsi penelitian yang diawali dengan studi untuk tujuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz M., Ari, 1996, **Peranan Retribusi Pasar Terhadap PAD Studi Kasus Pasar di Kabupaten Dati II Sirap**, Tesis S-2 PPS UGM, Yogyakarta. (tidak dipubli-kasikan)

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, 2000, **Laporan Pendapatan Tahun Anggaran 1995-1996 s/d 1999-2000**.

Direktorat Jendral Pariwisata, 1990. **Bahan Baku Penyuluhan Standar Wisata**, Departemen Pariwisata, Pos dan Tele komunikasi, Jakarta.

Direktorat Jendral Pariwisata, 1996. **Visi Pariwisata Indonesia 2005**, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Jakarta.

Departemen Dalam Negeri, 1997, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 18 Catatan Pertama**, Harvando, Jakarta.

Devas, N., Binder, B., Booth, A., Davey K., Kelly, R., 1989, **Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Davey, K.J.,

-
- 1988, ***Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-prektek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga***, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Danurejo, S.L.S., 1967, ***Otonomi di Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan***, Leeros, Jakarta.
- Erawan, I Nyoman, 1995, ***Dampak Pariwisata Terhadap Per ekonomian Daerah Bali*** (1984-1994), *Majalah Ilmiah Unud*, No. 44 Tahun XXII April, 24-32.
- Fandeli C., 1995, ***Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam***, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Fauzi, S., 1997, ***Peranan Retribusi Pasar Terhadap Biaya Pengelolaan Pasar dan PAD Studi Kasus Pada Pemda Kota Madya Samarinda***, Tesis S-2 PPS UGM, Yogyakarta. (tidak dipublikasi kan)